



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA KE-1  
MASA SIDANG I - TAHUN SIDANG 2005-2006**

**Gedung Nusantara V, 15 Agustus 2005**

---

**1. Pembukaan Sidang Paripurna DPD Ke-1 Tahun Sidang 2005-2006**

- Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir ... orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD, kuorum telah tercapai, dan sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
- Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Sidang Paripurna Ke-1 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**2. Agenda Pokok Sidang Paripurna Ke-1 DPD Tahun Sidang 2005-2006**

Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna Ke-1 DPD ini mempunyai 3 (tiga) agenda pokok yaitu :

- Pembukaan Masa Sidang Ke-1 DPD Tahun Sidang 2005-2006, dan sesuai dengan ketentuan akan disampaikan Pidato Pembukaan oleh Pimpinan DPD;
- Penyerahan Laporan Tertulis Sekretaris Jenderal Tentang Pelaksanaan Tugas Selama Masa Sidang 2004-2005; dan
- Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari setiap Provinsi.

**3. Berdoa**

Hadirin yang kami muliakan, Sidang Paripurna DPD kali ini diselenggarakan pada saat bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-60. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki agenda pokok Sidang Paripurna I DPD ini, kami ingin mengajak kita semua untuk mengheningkan cipta sejenak mengenang jasa para Pahlawan Kusuma Bangsa yang telah mengantarkan kita semua memasuki alam kemerdekaan, mengisinya dengan pembangunan, seraya memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam memasuki enam puluh tahun kemerdekaan; serta berdoa, semoga arwah para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya. Kita mohon pula kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang begitu berat, semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengemban amanah rakyat, membangun bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. **MENGHENINGKAN CIPTA, MULAI!**

**4. Pidato Pembukaan Masa Sidang I DPD Tahun 2005-2006.**

Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian kita bersama dalam memasuki Masa Sidang Tahun 2005-2006

- Sejak pelantikan anggota DPD tanggal 1 Oktober 2004, kita bersama telah menyelesaikan satu tahun masa sidang dan mulai hari ini akan memasuki masa sidang tahun kedua 2005-2006. Dalam kurun waktu tersebut, meskipun sebagai lembaga baru, DPD telah ikut mewarnai kehidupan berdemokrasi di Indonesia dengan mengambil bagian dalam upaya mengatasi berbagai persoalan bangsa.

- Di awal kelahiran DPD, masih segar dalam ingatan kita, bagaimana upaya gigih dan kekompakan para anggota DPD membangun kesetaraan sebagai lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga perwakilan lainnya (DPR) melalui penempatan dua orang wakilnya untuk duduk sebagai Pimpinan MPR. Kekompakan tersebut membuat DPD menjadi kuat dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan meskipun jumlah anggota DPD lebih sedikit. Kekompakan itu haruslah terus kita bina dalam mengemban tugas ke depan yang kita yakin akan semakin berat. Sebagaimana telah kami utarakan pada pidato penutupan masa sidang yang lalu, bahwa interaksi yang lebih intensif, jujur, dan terbuka antara para anggota, antara anggota dan pimpinan, serta antar pimpinan memang sangat dikehendaki. Membangun suasana kebersamaan dan solidaritas sangat kita perlukan untuk dapat mengatasi tantangan yang demikian besar sebagai lembaga negara baru dan lembaga yang meskipun legitimasi politiknya tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat, tetapi kewenangan formalnya sangat terbatas.
- Hubungan kerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja DPD, begitu pula dengan DPR, dan lembaga-lembaga Negara lainnya, telah terjalin dengan baik dan akan terus kita pererat dalam rangka membahas dan merumuskan kebijakan-kebijakan nasional khususnya yang terkait dengan persoalan dan kepentingan daerah, serta dalam rangka mengembangkan mekanisme *checks and balances*, dan pengawasan atas jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- Dalam masa tugas yang masih sangat singkat, DPD telah mewarnai wacana dan merespons berbagai permasalahan yang timbul di daerah-daerah, seperti bencana alam, konflik-konflik sosial dan perbatasan, pendidikan, kesehatan, berbagai kegiatan illegal dan berbagai isu lainnya dalam masyarakat.
- Kita bersyukur bahwa DPD telah melaksanakan dengan hasil yang nyata beberapa tugas konstitusionalnya yaitu memberikan pertimbangan atas RUU APBN Perubahan, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.
- Pada masa persidangan yang lalu DPD telah berupaya menghimpun dan mengolah aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Hasil pengolahan dan pengawasan tersebut perlu kita cermati kembali substansi materinya dan akan kita tetapkan dalam Masa Sidang ini sebagai pertimbangan DPD kepada DPR yang diamanatkan oleh konstitusi, dan akan kita sampaikan pula kepada Pemerintah sebagai informasi.
- Menjelang akhir Masa Sidang yang lalu dan selama masa kita kembali ke daerah telah berlangsung pesta demokrasi rakyat di berbagai daerah, yaitu rakyat memilih kepala daerahnya secara langsung, baik Gubernur, Bupati atau Walikota.
- Secara umum pilkada telah berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Sebagian besar daerah telah menyelenggarakan dan menuntaskan proses pilkada tanpa banyak halangan. Namun di berbagai daerah telah timbul masalah, karena terjadinya pandangan yang berbeda secara tajam mengenai proses dan hasil pilkada. Di berbagai daerah telah terjadi protes massa, benturan-benturan politik dan proses hukum, yang menunjukkan bahwa tidak di semua tempat pilkada berjalan dengan mulus. Kita menyadari pilkada ini memang sebuah pengalaman baru bagi kita, jadi jika di sana sini ada kelemahan tentunya wajar saja.
- Yang penting kita perlu berupaya untuk memperkecil peluang-peluang terjadinya masalah serupa dikemudian hari. Pelaksanaan pilkada tahap yang pertama ini perlu kita evaluasi. DPD memang tidak boleh berpihak dan tidak berwenang menentukan mana yang benar atau yang salah, atau siapa yang seharusnya menang atau kalah, tetapi mengambil pelajaran dari pengalaman itu, agar proses pilkada selanjutnya akan lebih lancar, damai dan aman, sehingga pilkada dapat benar-benar terselenggara secara adil dan jujur. Evaluasi ini merupakan tugas penting dari PAH I, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penyelenggaraan pilkada selanjutnya. Ini merupakan bagian dari tugas DPD untuk melaksanakan pengawasan atas UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, di mana pilkada termasuk di dalamnya.
- PAH I juga akan dihadapkan dengan masalah pemekaran daerah di beberapa provinsi. Adanya keinginan masyarakat untuk memekarkan daerah ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk mempercepat laju pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerahnya, dengan lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat. Namun banyak kalangan meragukan apakah pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota betul-betul didasari oleh semangat itu, atau lebih kepada kepentingan politik elit lokal dan karenanya seringkali menimbulkan konflik yang justru dapat menghambat pertumbuhan daerah. Masalah ini merupakan salah satu amanat UUD 1945 kepada DPD, yang dipercayakan kepada PAH I. Dalam rangka itu, PAH I perlu melakukan kajian yang mendalam mengenai kelayakan daerah yang bersangkutan di bidang sosial, ekonomi, keamanan, hukum, dan politik.

- Masalah lain yang kita tidak boleh lengah dan karenanya harus terus memperoleh perhatian kita bersama adalah potensi disintegrasi bangsa. Meskipun gejalanya telah menunjukkan penurunan dibandingkan dengan pada awal terjadinya krisis, namun kita tidak pernah boleh menganggap enteng. Bagi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sudah final pada saat kemerdekaan negara ini diproklamasikan. Daerah konflik, rawan konflik, dan pasca konflik perlu terus mendapat perhatian kita semua. Dalam kerangka itu, kita patut bersyukur bahwa dalam Pertemuan di Helsinki, Finlandia tanggal 18 Juli 2005 yang lalu telah dicapai kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM. Kesepakatan damai yang akan ditandatangani hari ini, 15 Agustus 2005 tersebut merupakan terobosan yang sangat berarti bagi penyelesaian konflik dan masa depan Aceh. Kesepakatan tersebut merupakan momentum untuk membangun perdamaian sekaligus demokrasi dan kesejahteraan rakyat di Aceh.
- Namun DPD tetap perlu mendalami isi perjanjian tersebut, serta tindak lanjut pelaksanaannya, agar tidak memperlemah wawasan kebangsaan dan rasa keadilan, serta tidak keluar dari bingkai NKRI.
- Selama kita berada di daerah, kita dikejutkan oleh adanya berita bahwa DPR (*House of Representatives*) Amerika Serikat menyetujui sebuah rancangan yang memuat kata-kata mengenai Papua yang menusuk perasaan dan rasa kehormatan kita sebagai bangsa yang berdaulat. Meskipun hal ini menyangkut persoalan politik luar negeri, yang tidak diamanatkan oleh UUD 1945 kepada DPD, namun karena yang dipermasalahkan adalah tanah Papua yang adalah tanah air kita, dan menyangkut integritas NKRI, maka hal ini jelas menjadi tanggung jawab DPD pula. Oleh karena itu, pimpinan DPD telah mengambil langkah-langkah antara lain dengan menghubungi pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat serta Staf Kongres yang berkunjung ke Indonesia. Kami juga berkonsultasi dengan pemerintah khususnya Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah ini. Hingga saat ini pihak pemerintah Amerika Serikat menjamin bahwa tidak ada upaya untuk memperlemah integritas nasional Indonesia dan tidak mendukung upaya apapun yang akan memisahkan tanah Papua dari Indonesia. Sikap itu dikuatkan pula oleh pernyataan staf Senat Amerika Serikat yang berkunjung kepada kami. Sebagaimana dimaklumi, sebuah kebijakan yang akan dituangkan dalam Undang-Undang harus disetujui oleh kedua unsur dalam Kongres Amerika Serikat, yaitu DPR dan Senat.
- Meskipun sudah ada jaminan itu, kita sebagai bangsa tidak boleh lengah. Keluar tentu diplomasi harus ditingkatkan, namun yang lebih penting adalah juga konsolidasi dan menghilangkan kelemahan-kelemahan kita di dalam.
- DPD perlu terus mendorong Pemerintah agar permasalahan yang dihadapi saudara-saudara kita di tanah Papua segera diselesaikan. Di antara berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah belum memadainya kesempatan untuk memberdayakan diri secara maksimal sehingga masyarakat Papua belum dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, serta berbagai hal lainnya dalam rangka otonomi khusus.
- Berbagai permasalahan yang dihadapi di tanah Papua perlu secara seksama diikuti perkembangannya untuk selanjutnya dibahas serta diupayakan mencari pemecahannya dalam forum-forum DPD, khususnya di PAH I.
- Selain itu berbagai permasalahan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu mendapat perhatian dalam sidang-sidang DPD ke depan. Antara lain masalah pertanian. DPD perlu mempelajari berbagai persoalan di bidang agraria dan pertanian, untuk menjamin bahwa masalah tanah tidak menjadi penghalang bagi pembangunan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa, tetapi juga menjamin hak dan rasa keadilan rakyat.
- Bangsa kita juga dihadapkan pada permasalahan pelik yang juga merupakan keperluan hidup rakyat banyak yaitu energi, khususnya BBM. Masalah ini terkait erat di satu pihak dengan subsidi yang memberatkan anggaran negara dan dinikmati oleh anggota masyarakat yang tidak memerlukan subsidi, dan di lain pihak nasib rakyat miskin dan yang berpenghasilan rendah yang selalu paling menderita apabila ada kenaikan harga BBM. Maka harus dicari pemecahan atas dilema ini.
- Hal ini perlu menjadi prioritas pembahasan di PAH II. PAH II perlu bekerjasama dengan mitra kerja terkait, dan dengan dukungan para pakar, bersama-sama berupaya merumuskan kebijakan energi nasional yang baik, yakni yang adil dan tepat sasaran.
- Masalah kebakaran hutan yang kerap terjadi di Tanah Air juga perlu mendapat perhatian kita semua. Kebakaran hutan yang sekarang sedang terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan membawa dampak terhadap kondisi alam dan kesehatan masyarakat. Asap tebal yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut saat ini telah mengganggu aktivitas masyarakat baik di kawasan sekitar kebakaran maupun di kawasan negara tetangga kita. Dalam kaitan ini, PAH II perlu mengupayakan perbaikan pengelolaan hutan yang merupakan kekayaan alam karunia Tuhan agar dapat bermanfaat bagi ekonomi

nasional dan bagi rakyat setempat dengan tetap mempertahankan kelestarian dan kualitas lingkungan, karena hutan adalah sumber kehidupan bagi umat manusia di dunia ini.

- Menjelang kita kembali ke daerah, kami sebagai Pimpinan telah memesankan agar perhatian kita lebih dicurahkan pada persoalan yang amat mendasar, yang kita hadapi dewasa ini yaitu masalah kemiskinan. Sebelum krisis, tingkat kemiskinan sudah sangat jauh berkurang. Namun krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan telah membuat jutaan keluarga kembali jatuh keperangkap kemiskinan.
- Kondisi kesehatan masyarakat yang memburuk di berbagai daerah adalah simtom dari ketidakmampuan keluarga untuk hidup secara layak dan ketidakmampuan masyarakat untuk menolong sesama anggota masyarakatnya. Kami berpendapat DPD harus menjadikan masalah kemiskinan, sebagai salah satu bentuk terburuk ketidakadilan, sebagai agenda kerja utama kita.
- Berkait erat dengan masalah kemiskinan adalah masalah pendidikan, yang sekaligus menjadi penyebab dan akibat kondisi kemiskinan, sehingga melahirkan apa yang disebut lingkaran kemiskinan.
- Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah. Karena berpendidikan rendah, walaupun bisa bekerja, produktivitasnya rendah sehingga imbalan yang diterima tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga-keluarga miskin pula pada generasi berikutnya.
- Masalah pendidikan merupakan masalah mendesak bagi bangsa ini. Meskipun telah ada amanat yang jelas dalam UUD 1945 mengenai hal ini, pelaksanaannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu masalah pendidikan harus menjadi agenda utama pula dari DPD dalam masa bakti kita, yaitu 2004-2009.
- Upaya menyelesaikan masalah ketimpangan daerah dan kemiskinan serta peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan harus tercermin dalam APBN. Dari sisi-sisi ini DPD harus melihat tajam RAPBN, dimulai dengan RAPBN Tahun 2006 yang untuk pertama kalinya DPD ikut berperan memberikan pertimbangan. Ini merupakan tugas kita semua, tugas semua PAH, meskipun muaranya adalah di PAH IV. Sesuai dengan hakekat tugas DPD, perhatian khusus harus diberikan kepada pengalokasian dana-dana, baik umum maupun khusus, untuk daerah, termasuk mekanisme bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah.
- Program ke depan yang juga harus menjadi perhatian sungguh-sungguh dari seluruh PAH adalah Program Legislasi. Salah satu ukuran keberhasilan DPD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah, akan dilihat dari seberapa jauh kontribusi DPD dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dalam Tahun Sidang Pertama, karena kesibukan kita dengan urusan-urusan internal, kita belum berhasil menyusun satu pun rancangan undang-undang. Dalam Tahun Sidang Kedua ini, kami mengharapkan DPD sudah dapat menyusun dan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, setidaknya satu atau dua rancangan undang-undang usul inisiatif dari DPD, sesuai dengan ruang lingkup tugas DPD.
- Kami juga mengharapkan kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama PPUU dapat menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPD, yang materinya sebagian besar telah disepakati, hanya tinggal beberapa pasal saja, sehingga kita dapat segera bekerja dengan pegangan Tata Tertib yang lebih baik.
- Bersama dengan International IDEA sedang disusun rencana lokakarya untuk merumuskan visi, misi, dan rencana strategik DPD ke depan. Visi dan misi itu diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang ingin dicapai DPD untuk selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional ke dalam rencana strategik. Lokakarya tersebut direncanakan akan diikuti oleh seluruh anggota, dan persiapannya dilakukan oleh Panitia Musyawarah bekerjasama dengan International IDEA.
- Diantara semua kegiatan kita salah satu yang paling mendasar adalah upaya memberdayakan DPD sehingga dapat menjalankan perannya secara sungguh-sungguh sebagai sebuah lembaga legislatif, dan dapat memenuhi aspirasi dan harapan terhadap DPD. Dengan mencermati berbagai materi kandungan UUD 1945 dan terus melakukan pendekatan dan saling memberikan pemahaman dengan fraksi-fraksi di DPR, Kelompok Anggota DPD di MPR diharapkan dapat memperjuangkan amandemen UUD 1945, sebelum masa bakti kita berakhir.
- Di samping berbagai agenda besar, pada awal Masa Sidang ini kita juga harus menyelesaikan sebuah agenda internal, yang rutin setiap tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib, keanggotaan semua alat kelengkapan DPD termasuk kelompok DPD di MPR, ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir masa keanggotaan DPD. Berkenaan dengan itu, kami mengharapkan agar setiap provinsi menyerahkan daftar nama Anggota yang akan duduk di alat kelengkapan tersebut kepada Sekretariat

Jenderal selambat-lambatnya besok tanggal 16 Agustus 2005. Pada Sidang Paripurna berikutnya kita bersama akan mengesahkan keanggotaan Alat kelengkapan DPD Tahun Sidang 2005-2006, dan selanjutnya memilih pimpinan-pimpinannya. Kami telah meminta Panitia Musyawarah untuk merumuskan tata cara pemilihan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan tersebut.

- Pada kesempatan ini, kami, dan saya kira kita semua, wajib memberi selamat dan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan kita yang ada di PAH I, II, III, dan IV, serta Badan Kehormatan, Panmus, PPUU, PURT, PKALP, dan kelompok DPD di MPR, periode Masa Sidang 2004-2005 yang telah bekerja keras dan menghasilkan berbagai prestasi meskipun belum maksimal oleh keadaan yang serba terbatas.
- Dengan amandemen UUD 1945 yang melahirkan DPD sebagai lembaga perwakilan yang baru, berbagai kebiasaan ketatanegaraan kita memerlukan penyesuaian antara lain adalah proses dalam penyusunan RAPBN. UUD 1945 mengamanatkan kepada DPD untuk memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Demikian pula dalam, setiap hal yang menyangkut perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Instrumen utama dari berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan adalah APBN. Oleh karena itu dalam sistem ketatanegaraan yang baru ini peran DPD harus tercermin. Bertolak dari amanat konstitusi tersebut, dengan DPR dan Pemerintah telah dibahas bagaimana caranya Pemerintah menyampaikan RAPBN yang selama ini hanya kepada DPR.
- Semula memang ada pemikiran untuk mengadakan sidang gabungan antara DPR dan DPD. Namun jalan tersebut sulit dapat ditempuh karena tidak ada mekanisme yang mengaturnya baik dalam Tata Tertib DPR maupun DPD. Akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa Presiden akan menyampaikan RAPBN tersebut kepada DPR dan DPD secara terpisah, dengan sendirinya tentu bukan dalam materi yang sama.
- Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, RAPBN 2006 dan Nota keuangannya tetap akan disampaikan oleh Presiden di hadapan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus 2005. Para anggota DPD diundang untuk menghadiri acara tersebut. Pidato Presiden di muka DPR, yang disebut pidato kenegaraan biasanya akan menyampaikan banyak hal diluar RAPBN, sehingga penyampaian materi RAPBN itu bersifat umum, garis-garis besar dan prioritas utama saja.
- Hal-hal yang lebih rinci khususnya mengenai pembangunan daerah akan disampaikan oleh Presiden dalam sidang Paripurna DPD. Sehubungan dengan itu maka DPD akan mengundang Presiden untuk hadir dalam Sidang Paripurna DPD dalam rangka menyampaikan pidato mengenai pembangunan daerah dalam RAPBN 2006. Waktunya telah disepakati, yaitu tanggal 23 Agustus yang akan datang. Untuk sampai pada kesepakatan tersebut panjang jalannya dan panjang ceritanya. Namun kita bersyukur bahwa telah diperoleh sebuah penyelesaian yang baik, yang menguntungkan bagi bangsa dan negara, dan menguntungkan bagi demokrasi, yang saat ini kerangka bangunannya sedang kita tegakkan dan kita isi, antara lain melalui pembentukan lembaga perwakilan daerah di mana kita mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menjadi anggota dalam pemilihan yang pertama kalinya.
- Dalam Sidang Paripurna DPD tersebut direncanakan akan diundang Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
- Kami mengharapkan bantuan dari semua anggota untuk suksesnya acara tersebut. Kita semua tentu berharap kiranya acara tersebut dapat membawa manfaat bukan hanya bagi DPD tetapi bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat daerah. Apabila acara yang pertama ini berhasil baik dan mendapat respons yang positif dari masyarakat, kita harapkan acara ini dapat diselenggarakan setiap tahun sehingga berkembang menjadi sebuah konvensi baru dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
- Agar kehadiran para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota tidak hanya sekedar mengikuti sidang Paripurna DPD, kami telah meminta Menteri Dalam Negeri agar dapat memanfaatkan kehadiran mereka di ibukota.
- Memanfaatkan kesempatan itu pula, DPD bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara akan menyelenggarakan Program Pengembangan Eksekutif Nasional bagi para Kepala Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota) yang terpilih pada pelaksanaan pilkada yang lalu. Tujuan penyelenggaraan program tersebut adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan amanah serta terwujudnya *Good Local Governance*. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan tanggal 24-26 Agustus 2005.

## 5. Laporan Panitia Musyawarah dan Pengesahan Perubahan Jadwal Persidangan DPD

- Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Sidang Paripurna DPD untuk mendengarkan Pidato Presiden R.I., maka Jadwal Persidangan DPD yang telah kita sepakati bersama akan mengalami sedikit perubahan. Berkenaan dengan itu, Rapat Pimpinan DPD pada tanggal 5 Agustus 2005 telah menyepakati agar Panitia Musyawarah membahas Rencana Penyelenggaraan Sidang Paripurna DPD tanggal 23 Agustus 2005 dan Perubahan Jadwal Persidangan DPD Masa Sidang I Tahun 2005-2006.
- Panitia Musyawarah telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 12 Agustus 2005. Berkenaan dengan itu, sebelum kita melanjutkan acara sidang pada pagi hari ini (*walaupun acara ini tidak teragendakan dalam sidang ini*) kami memandang perlu memberikan kesempatan kepada Pimpinan Panitia Musyawarah untuk menyampaikan usul perubahan jadwal tersebut guna memperoleh kesepakatan kita bersama. Kami persilakan.

## 6. Acara Kedua, Penyerahan Laporan Tertulis Sekretaris Jenderal Tentang Pelaksanaan Tugas Selama Masa Sidang 2004-2005

- Dukungan kesekretariatan yang efektif kepada sebuah lembaga negara apalagi lembaga negara baru seperti DPD sangat diperlukan. Pelayanan teknis dan administratif yang selama ini diberikan oleh Sekretariat Jenderal MPR telah kita rasakan bersama. Dan untuk itu sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan tanpa pamrih.
- Perlu kami sampaikan bahwa dukungan Sekretariat Jenderal MPR kepada DPD merupakan amanat Pasal 112 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 yang menyatakan, "*Sebelum Sekretariat Jenderal DPD dibentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR.*" Ketentuan Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa dukungan Sekretariat Jenderal MPR kepada DPD adalah bersifat sementara. Sebagai sebuah lembaga negara baru DPD memerlukan sebuah Sekretariat Jenderal tersendiri yang secara khusus dibentuk untuk memberikan dukungan administrasi dan keahlian, sementara MPR sendiri walaupun kegiatannya sudah banyak berkurang, tetap memerlukan sebuah Sekretariat Jenderal yang secara khusus pula memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- Alhamdulillah, penyusunan dan pembahasan organisasi Sekretariat Jenderal DPD telah selesai dilaksanakan, dan Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal DPD. Dengan demikian, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan memiliki Sekretariat Jenderal tersendiri. Dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Peraturan Tata Tertib DPD, Pimpinan DPD akan mengajukan calon Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPD kepada Presiden, serta akan membahas lebih lanjut rencana pembentukan Sekretariat Jenderal DPD. Sementara itu sambil menunggu terbentuknya Sekretariat Jenderal DPD, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005, Sekretariat Jenderal MPR tetap melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan DPD sampai dengan Sekretariat Jenderal DPD dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden tersebut.
- Dalam Rapat Pimpinan DPD tanggal 12 Agustus 2005, telah disepakati untuk tahap pertama DPD hanya akan menetapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPD. Untuk itu Pimpinan DPD akan mengusulkan kepada Presiden 3 (tiga) orang calon Wakil Sekretaris Jenderal yang berasal dari Pejabat Sekretariat Jenderal MPR yang sudah memenuhi syarat kepangkatan. Calon-calon Wakil Sekretaris Jenderal itu diambil dari pejabat-pejabat eselon II Sekretariat Jenderal MPR/DPD atas usul Sekretaris Jenderal MPR/DPD. Untuk sementara waktu, jabatan Sekretaris Jenderal DPD masih dirangkap oleh Sekretaris Jenderal MPR. Hal ini dimaksudkan agar dukungan kesekretariatan kepada DPD tidak vakum dan dengan demikian seluruh kegiatan DPD masih dapat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR.
- Selanjutnya Sekretaris Jenderal DPD/MPR bersama-sama dengan Wakil Sekretaris Jenderal DPD segera menyusun organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPD. Diharapkan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPD telah terbentuk. Landasannya adalah Keputusan DPD Nomor: 6/DPD/2005 yang ditetapkan pada Sidang Paripurna ke-17 tanggal 23 Maret 2005 yang menugasi Sekretariat Jenderal MPR/DPD untuk menyusun dan membahas organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPD bersama-sama dengan Kantor Kementerian Aparatur Negara. Dalam melakukan penyusunan dan pembahasan organisasi dan tata kerja itu, Sekretariat Jenderal MPR/DPD senantiasa berkonsultasi dengan Panitia Urusan Rumah Tangga.
- Setelah organisasi Sekretariat Jenderal DPD terbentuk, maka Pimpinan DPD akan mengajukan calon-calon Sekretaris Jenderal DPD kepada Presiden. Pimpinan DPD sepakat bahwa dalam pengajuan calon-calon tersebut, selain calon-calon dari lingkungan MPR/DPD sendiri dapat pula diajukan calon-calon dari luar

yang memenuhi persyaratan dan memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kemampuan untuk memimpin Sekretariat Jenderal DPD.

- Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 huruf d Peraturan Tata Tertib DPD, bahwa “*Tugas Sekretariat Jenderal adalah melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada pimpinan DPD pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam Sidang Paripurna*”, kami ingin memberikan kesempatan kepada Saudara Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan pokok-pokok Laporan Pelaksanaan Tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu serta menyerahkan laporan secara lengkap dan tertulis kepada Pimpinan dalam Sidang Paripurna ini. Kami persilakan.
- Laporan Sekretariat Jenderal MPR/DPD yang telah disampaikan tadi kami harap untuk dipelajari oleh PURT, sebagai bahan untuk menyempurnakan kinerja Sekretariat Jenderal kedepan.

#### **7. Acara Ketiga, Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari setiap Provinsi.**

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf f dan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD, kegiatan anggota DPD di daerah dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang DPD.
- Penyampaian hasil kegiatan di daerah dari setiap Provinsi yang semula direncanakan pada hari ini, kami mengusulkan untuk dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2005. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing Provinsi dapat mempersiapkan laporannya dengan sebaik mungkin.
- Perlu kami ingatkan, penyampaian laporan masing-masing Provinsi diharapkan memakan waktu tidak lebih dari 10 menit. Laporan yang lebih lengkap diserahkan kepada Pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan. Selanjutnya Pimpinan DPD, melalui Sekretariat Jenderal, akan mengolah laporan tersebut dan meneruskannya kepada alat-alat kelengkapan DPD untuk ditindaklanjuti.

#### **8. Penutupan Sidang Paripurna ke-1 DPD**

- Sebelum menutup Sidang Paripurna ke-1 ini, perlu kami ingatkan bahwa Masa Sidang I DPD akan berlangsung singkat, yaitu dari tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan 30 September 2005 (33 hari kerja). Oleh sebab itu, kami menghimbau agar waktu yang singkat ini dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin.
- Akhirnya, dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Sidang Paripurna ke-1 kami tutup.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warohamatullahi Wabarokatuh.*

-----